

RUSYDIAH

Jurnal Pemikiran Islam

Volume 3 Nomor 2, Desember 2022

ISSN: 2723-4894 (cetak), ISSN: 2723-4886 (daring)

DOI: <https://doi.org/10.35961/rsd.v3i2.569>

SISTEM DAN PILAR-PILAR NEGARA DALAM PEMIKIRAN IBN ABI RABI' (218-272 H): SEBUAH KAJIAN LITERATUR

Mohamad Latief

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

ahmadlatief@unida.gontor.ac.id

Adib Fattah Suntoro

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

adibsuntoro42001@mhs.unida.gontor.ac.id

Abstrak

Artikel ini adalah studi literatur terhadap karya fenomenal Ibn Abi Rabi' tentang politik berjudul *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*. Pemikiran Ibnu Abi Rabi' di bidang politik menarik untuk dikaji sebab argumentasinya tidak hanya bersandar pada dalil-dalil normatif al-Qur'an atau hadis semata namun juga pada argumentasi logis-filosofis, sehingga konstruksi pemikirannya merupakan harmonisasi antara akal dan wahyu. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yang prosesnya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *content analysis*, yaitu menganalisis data sesuai dengan kandungan isinya. Hasil penelitian menunjukkan sistem negara yang dipilih Ibn Abi Rabi' adalah kerajaan. Selain itu dalam pandangannya, terdapat empat pilar yang harus ada dan dioptimalkan fungsinya untuk menunjang eksistensi suatu negara. Masing-masing dari empat pilar tersebut adalah raja, rakyat, keadilan dan pengelolaan negara. Konsep kenegaraan Ibn Abi Rabi' ini digunakan sebagai buku petunjuk dalam mengelola pemerintahan di era Dinasti Abbasiyyah oleh Khalifah al-Mu'tashim.

Kata Kunci: Sistem; pilar-pilar; negara; Ibn Abi Rabi'

Abstract

This article is a literature review of *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*, a phenomenal work on politics by Ibn Abi Rabi'. Ibn Abi Rabi's political ideas are fascinating to study because his arguments do not rely solely on normative arguments from the Qur'an or hadith, but also on logical-philosophical arguments, resulting in a harmonization of reason and revelation. This research is a type of library research in which data is gathered from various sources of literature. In this study, data was analyzed using content analysis techniques, which means analyzing data based on its content. The study's findings indicate that Ibn Abi Rabi's chosen state system is a kingdom. Aside from that, he believes that four pillars must exist and optimize their functions in order for a country to exist. The four pillars are

the king, the people, justice, and state management. Caliph al-Mu'tashim used Ibn Abi Rabi's concept of statehood as a guidebook in managing government during the Abbasiyyah dynasty.

Keywords: System, pillars, state, Ibn Abi Rabi'.

PENDAHULUAN

Perdebatan seputar sistem kenegaraan masih menjadi salah satu isu paling penting dalam diskursus ilmu politik. Dalam konteks pemikiran Islam, para pemikir politik Islam telah menawarkan argumen-argumen tentang sistem kenegaraan serta bagaimana tata negara yang ideal dalam konsep politik Islam. Berbagai pandangan yang muncul tersebut menggambarkan dialektika hubungan Islam dengan politik yang diwarnai oleh kondisi sosial politik umat Islam.¹ Konsep-konsep tentang negara dan sistem pemerintahan serta hubungan berbagai komunitas dalam suatu negara menjadi isu yang menjadi fokus kajian para pemikir tersebut.

Jika kita melihat ke belakang, akan dijumpai banyak tokoh pemikir politik dalam peradaban Islam yang memiliki pemikiran politik kritis dan filosofis. Tokoh-tokoh tersebut mayoritas hidup pada era Khilafah Abbasiyah. Di antara tokoh-tokoh yang cukup terkenal yaitu Al-Baqillani (w. 1013 M), Al-Baghdâdi (w. 1037 M), Ibn Abi Rabi' (hidup pada masa Khalifah Al-Mu'tashim 833-842 M), Al-Mawardi (974-1058 M), Al-Juwaini (1028-1087 M), Al-Ghazali (1058-1111 M), Ibn Taimiyyah (1262-1328 M) dan Ibn Khaldûn (1332-1406 M).² Pemikiran tokoh-tokoh tersebut masih dapat kita kaji ulang. Sebab karya-karya tulis mereka telah terdokumentasikan dengan baik hingga saat ini.

Dari sekian nama tokoh di atas, agaknya Ibnu Abi Rabi' adalah tokoh yang paling menarik untuk dikaji pemikirannya. Sebab dibandingkan dengan al-Mawardi, Ibnu Abi Rabi' lebih dahulu hidup, yaitu pada masa pemerintahan al-Mu'tashim. Dengan demikian Ibnu Abi Rabi' merupakan tokoh pemikir politik yang paling awal dalam sejarah peradaban Islam yang karyanya masih dapat dijumpai hingga sekarang. Lebih dari pada itu, Ibnu Abi Rabi' tidak saja berperan sebagai pengamat atau pemikir politik belaka, ia juga berperan sebagai penasihat bagi Khalifah Abbasiyah yang saat itu berkuasa. Bahkan karyanya tentang tata negara yang berjudul *Suluk al-Malik fî Tadbir al-Mamalik* (Kebijakan Raja dalam Mengelola Pemerintahan) menjadi semacam buku panduan kenegaraan pada masa

¹ M. Ilham *et al*, "Caliphate; Is It Theological Inevitability or Sociological Experimentation?," dalam *Jurnal Ushuluddin* 29, no. 1 (2021): 61.

² Adil Tsabit, *Al-Fikr Al-Siyâsi Al-Islâmi* (Alexandria: Dar al-Jami'ah al-Jadid, 2002), 45.

pemerintahan Khalifah Dinasti Abbasiyyah kedelapan, al-Mu`tasim Billah.³ Maka penulis memandang sosok Ibn Abi Rabi' sebagai pakar ilmu politik yang memiliki wawasan keilmuan yang luas dan juga berotoritas, sehingga layak untuk dikaji secara lebih mendalam.

Dalam artikel ini, penulis fokus pada pemikiran politik Ibn Abi Rabi' terkhusus pemikirannya terkait sistem negara dan pilar-pilar bernegara. Isu ini menarik untuk didiskusikan sebab ia termasuk pemikir politik yang mendukung sistem negara monarki dan ia telah menjelaskan kelebihan sistem tersebut dalam bukunya. Ia juga memiliki konsep tentang pengelolaan negara yang meliputi empat pilar (*arkan al-mamlakah*). Sebuah kajian pemikiran yang merujuk pada makna teks, menurut Bevier dalam Rahmat (2021), hendanya memahami kepada siapa teks tersebut ditujukan. Kajian terhadap kitab *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik* pada dasarnya tidak hanya membahas terkait teks saja, tapi juga membahas latar belakang penulis disertai konteks dari gagasan Ibn Abi Rabi'.⁴

Oleh karena itu kajian terhadap pemikiran Ibn Abi Rabi' ini dapat menjadi bahan refleksi dalam tatanegara kontemporer. Sejauh ini belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengangkat topik tersebut. Beberapa penelitian yang sudah ada umumnya hanya membahas metodologi Ibn Abi Rabi' dalam pemerintahan Abbasiyah saja, seperti penelitian berjudul *Manhaj iyah al-Fikr al-Islamiy fi Takhtit al-Madinah al-'Arabiyah al-Islamiyah: Ibn Abi Rabi' Anmuzhajan*.⁵ Terdapat pula penelitian lain yang membahas pemikiran filsafat politik Ibn Abi Rabi' secara umum yaitu berjudul *al-Falsafah al-Siyasiyah 'inda Ibn Abi Rabi'*.⁶ Sehingga dengan demikian penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

METODE

Jenis penelitian dalam artikel ini tergolong sebagai penelitian pustaka (*library research*) yang prosesnya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Sumber data pokok yang dijadikan landasan dalam artikel ini adalah: 1) Sumber primer yang merupakan sumber data utama atau bahan-bahan yang

³ Rambe, "Pemikiran Politik Sunni Sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan," 20.

⁴ Syahrul Rahmat, "Political Thought in the Mamluk Period: The Unnecessary Caliphate, by Mohamad El-Merheb", dalam *African Historical Review* 52, no. 2 (2021), 87

⁵ Gharayibah, "Manhaj Iyah Al-Fikr Al-Islamiy Fi Takhtit Al-Madinah Al-'Arabiyah Al-Islamiyah: Ibn Abi Rabi' Anmuzhajan."

⁶ Al-Tasakriti, *Al-Falsafah Al-Siyasah "inda Ibn Abi Al-Rabi."*

terkait erat dengan pembahasan ini.⁷ Sumber primer yang dimaksud adalah buku karya Ibn Abi Rabi' berjudul *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik* (Kebijakan Raja dalam Mengelola Pemerintahan).⁸ 2) Sumber sekunder yang merupakan bahan-bahan kepustakaan yang menjelaskan sumber data primer tersebut, di antaranya seperti hasil penelitian, pendapat pakar yang mendukung tema pembahasan, atau tidak secara langsung berhubungan namun ada kesamaan tema yang dikembangkan.⁹

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu teknik deskriptif, artinya peneliti menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan sistem negara, serta mengungkap pemikiran Ibn Abi Rabi' tentang sistem dan pilar-pilar negara. Guna memperoleh data yang berhubungan dengan judul tersebut, maka penulis menggunakan metode dokumentasi, yakni data yang diambil dari buku-buku, majalah-majalah atau tulisan lain yang memenuhi persyaratan.¹⁰ Adapun data buku primer dan sekundernya telah penulis sebutkan dalam pembahasan sebelumnya.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *content analysis*, yaitu menganalisis data sesuai dengan kandungan isinya. Adapun metode analisis datanya menggunakan metode induktif. Peneliti mencoba menganalisis bagaimana pemikiran Ibn Abi Rabi' dalam memahami sistem dan pilar-pilar negara, kemudian dari pemahaman tersebut diambil kesimpulan umum tentang pemikiran Ibn Abi Rabi' tentang sistem dan pilar-pilar negara.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan historis. Pendekatan historis adalah metode yang menggunakan data masa lalu atau peninggalan sebelumnya, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari masa sekarang.¹¹ Penulis mencoba melakukan analisa terhadap pemikiran Ibn Abi Rabi' dengan menggali latar belakang historis, konteks sosial dan tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikirannya, dalam hal ini peneliti berpandangan bahwa pelacakan dari kondisi

⁷ Kaelan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama Dan Humaniora*, 148.

⁸ Ibn Abi Rabi', *Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik*.

⁹ Kaelan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama Dan Humaniora*, 63.

¹⁰ Sudarwan Danim, *Riset Keperawatan: Sejarah Dan Metodologi* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002), 52.

¹¹ Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 84.

historis tersebut sangat berguna dalam meneliti bangunan pemikiran seseorang. Tahap yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, memaparkan biografi Ibn Abi Rabi' dan latar belakang pemikirannya. *Kedua*, menelusuri dan memaparkan pemikiran politik Ibn Abi Rabi' terkait sistem dan pilar negara dalam karyanya yang berjudul *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*. *Ketiga*, menganalisa kebaruan dan perbedaan pemikiran Ibn Abi Rabi' dengan para pemikir sebelumnya serta mencari relevansi teorinya tersebut dalam konteks ilmu politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riwayat Hidup Ibn Abi Rabi'

Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Ahmad bin Abi Rabi' (W.272 H/ 885 M), yang hidup pada masa Dinasti Abbasiyyah (Baghdad, Irak).¹² Pada masa itu ilmu pengetahuan dalam berbagai cabang dan spesialisasinya mendapatkan tempat dan perhatian serius, baik oleh para peneliti dan pemikir Islam, dan bahkan mendapatkan dukungan besar dari para penguasa, terutama pada masa Khalifah al-Makmun, yaitu; Khalifah Dinasti Abbasiyyah ketujuh. Iklim inilah yang kemudian memunculkan perhatian besar dan tingginya minat di kalangan para sarjana Islam untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan secara rasional. Setelahnya mulai bermunculan sejumlah pemikir Islam yang mengemukakan gagasan atau konsep politik mereka melalui karya-karya yang ditulisnya.¹³

Ibn Abi Rabi' dianggap sebagai sarjana muslim pertama yang menuangkan gagasan teori politiknya dalam sebuah karya tulis.¹⁴ Karyanya terkait politik yaitu buku yang berjudul *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik* (Kebijakan Raja dalam Mengelola Pemerintahan). Buku ini dipersembahkan kepada al-Mu`tasim, Khalifah Dinasti Abbasiyyah kedelapan yang memerintah pada abad IX Masehi untuk dipergunakan sebagai *guiding book* dalam *mentadbir* atau mengelola pemerintahan. Karena buku ini diperuntukkan oleh Ibn Abi Rabi' kepada kepala negara yang sedang berkuasa saat itu, Munawir Sjadzali menegaskan dapat dipastikan bahwa Ibn Abi Rabi' tidak mempersoalkan sistem monarki sebagai suatu sistem

¹² Ibn Abi Rabi', *Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik*, 7.

¹³ Nasution, "Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Periode Harun Al-Rasyid Dan Al-Makmun," 401.

¹⁴ Muhammad Jalal Syaraf, *Nasy'ah Al-Fikr Al-Siyasi Wa Tathawuriha Fi Al-Islam*, 204.

pemerintahan yang sedang berjalan, bahkan Ibn Abi Rabi` memberikan dukungan penuh kepada sistem pemerintahan ini.¹⁵

Pengakuan Ibn Abi Rabi' terhadap sistem pemerintahan monarki (kerajaan) ini ditunjukkan oleh Ibn Abi Rabi' dalam kata pengantar bukunya berupa sanjungan kepada Khalifah, ia mengatakan:

“Merupakan kebahagiaan bagi penduduk atau rakyat zaman ini karena pemimpin mereka (*Imamahum*), ketua tertinggi mereka (*Muqallid siyasatihim*), dan pengelola pemerintahan mereka (*wa Mudabbir mulkihim*) adalah seorang yang telah terkumpul semua kebaikan, semua kelebihan dan keutamaan (kehormatan), terkumpul semua sifat yang terpuji, yaitu orang yang selalu memperbaiki kondisinya dengan tetap komitmen pada agama, dan tetap berpegang teguh pada Islam dan ajaran Nabi, yaitu Khalifah al-Mu`tashim Billah, Amirul Mu`minin, di mana semua umat taat kepadanya, semua kerajaan patuh kepadanya, dan para musuh tunduk kepadanya.”¹⁶

Menurut keterangan Arif Ahmad Abd al-Ghani,¹⁷ tidak banyak yang dapat diketahui tentang Ibn Abi Rabi`, selain dia sebagai penulis buku yang berjudul *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*. Bahkan terkait kapan tepatnya ia dilahirkan dan kapan wafatnya pun masih diragukan keakuratannya. Menurut al-Zarkali dalam *al-A`lam*¹⁸ dan Kahalah dalam *Mu`jam Mu`alifin*,¹⁹ ia di lahirkan pada tahun 218 H dan wafat pada 272 H. Namun data ini menjadi kontradiktif dengan keterangan bahwa Ibn Abi Rabi' menghadiahkan bukunya kepada Khalifah Mu'tashim yang berkuasa antara tahun 218 hingga 227 H, bagaimana mungkin ia menghadiahkan buku padahal masih bayi.²⁰

Pemikiran Ibn Abi Rabi' tentang Negara

Ibn Abi Rabi` berpandangan bahwa secara fitrah manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu diperlukan kerja sama dan hubungan timbal balik antara sesama manusia guna menunjang kebutuhan hidupnya. Melalui interaksi sosial yang terjadi antar sesama individu terbentuklah interaksi yang semakin luas dimensinya dan kemudian

¹⁵ Sjadzali, *Kepala Negara, Keadilan, Rakyat, Dan Pengelolaan*, 42.

¹⁶ Ibn Abi Rabi', *Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik*, 40.

¹⁷ Ia adalah pentahqiq kitab *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*.

¹⁸ Zarkali, *Al-A`lam*, 205.

¹⁹ Kahalah, *Mu`jam Al-Mu`alifin*, 101.

²⁰ Ibn Abi Rabi', *Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik*, 7–8.

terbentuklah suatu komunitas masyarakat.²¹ Komunitas masyarakat yang menetap di suatu tempat ini merupakan embrio terbentuknya organisasi kekuasaan (negara).²²

Keperluan dan hajat hidup yang dibutuhkan menurut Ibn Abi Rabi` meliputi; 1) Pakaian (*al-libas*) untuk melindungi diri dari rasa sakit udara panas, udara dingin, dan tiupan angin kencang, 2) Kebutuhan terhadap makanan yang menjadikan jasmani kuat untuk beraktivitas dan bekerja, 3) Tempat tinggal untuk penjaagaan dan pertahanan dari berbagai ancaman bahaya, 4) Reproduksi untuk menjamin kelangsungan kehadiran manusia di muka bumi ini, 5) Pelayanan kesehatan untuk menjaga kestabilan jasmani.²³

Apabila diperhatikan secara sepintas, teori Ibn Abi Rabi` tentang asal muasal lahirnya negara cukup identik dengan teori Plato yang sudah ada terdahulu. Namun apabila dicermati dengan seksama, akan tampak bahwa Ibn Abi Rabi` tidak serta-merta menduplikat teori Plato secara utuh, karena Ibn Abi Rabi` sebagai seorang muslim tidak terlepas dari *worldview* keislamannya.²⁴ Hal ini dapat dikonfirmasi dalam gagasannya yang memasukkan paham ketuhanan dan memadukannya dengan pandangan-pandangannya tentang asal usul kemunculan negara atau kota. Hal inilah titik tolak membedakan gagasannya dengan gagasan Plato.²⁵

Harus diakui beberapa gagasan Ibn Abi Rabi` tentang politik memang dipengaruhi oleh pemikir-pemikir Yunani Kuno, terutama Plato dan Aristoteles. Salah satunya adalah tentang penegasan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri untuk berperadaban (*anna al-insân madaniy bi thab'ihî*). Pandangan ini adalah pandangan yang disampaikan Aristoteles di dalam karyanya; *Politik*.²⁶ Namun selanjutnya Ibn Abi Rabi` mengemasnya dalam bingkai keilmuan Islam (*Islamic framework*). Terdapat setidaknya tiga unsur tambahan yang didasarkan pada ajaran agama Islam dalam pandangan Ibn Abi Rabi, yaitu; 1) Kecenderungan

²¹ Khotimah, "Agama Dan Civil Society," dalam *Ushuluddin* 1, no. 0 (2014): 124.

²² Sjadzali, *Kepala Negara, Keadilan, Rakyat, Dan Pengelolaan*, 43.

²³ Ibnu Abi Rabi', *Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik*, 101; Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abdul Mukthi Muhammad, *Al-Fikr Al-Siyasi Fiy Al-Islam: Syakhshiyat Wa Mazahib*, 209.

²⁴ Zarkasyi, "Worldview Islam Dan Kapitalisme Barat," 18.

²⁵ Muhammad Jalal Syaraf, *Nasy'ah Al-Fikr Al-Siyasi Wa Tathawuriha Fi Al-Islam*, 212; Sjadzali, *Kepala Negara, Keadilan, Rakyat, Dan Pengelolaan*, 44.

²⁶ Raimundus Bulet Namang, "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles," dalam *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 255.

manusia untuk berkumpul dan bermasyarakat merupakan watak atau tabiat yang diciptakan Allah kepada manusia. 2) Allah telah meletakkan peraturan-peraturan tentang hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota masyarakat sebagai landasan yang harus dipatuhi. Peraturan-peraturan tersebut sudah termaktub di dalam kitab suci al-Qur`an. 3) Allah juga telah mengangkat penguasa-penguasa yang bertugas untuk memastikan berlakunya peraturan-peraturan di kalangan rakyat dan mengelola masyarakat berdasarkan petunjuk-petunjuk Ilahi.²⁷

Terkait dengan pemerintahan, Ibn Abi Rabi' berpandangan bahwa asas yang mendorong manusia untuk membentuk peradaban dan membentuk pemerintahan adalah karena secara naluriah manusia akan berusaha terhindar dari keburukan (*syarr*). Dalam pandangannya keburukan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu; (1) keburukan yang berasal dari dalam diri manusia, (2) keburukan yang berasal dari masyarakat (penduduk) itu sendiri, dan (3) keburukan yang berasal dari masyarakat (penduduk) lain. Adapun sarana untuk menghindarkan diri dari keburukan-keburukan tersebut tentu berbeda-beda. Untuk keburukan kategori pertama, dapat ditepis oleh seseorang di antaranya dengan menempuh jalan kebaikan, memperbaiki jiwanya, atau dengan bersikap rasional dalam berperilaku. Sedangkan untuk keburukan kategori kedua, dapat ditanggulangi dengan optimalisasi tata aturan dan hukum-hukum guna perbaikan masyarakat. Adapun pencegahan keburukan kategori ketiga, yaitu dengan memperkuat kemiliteran dan pembangunan sarana prasarana penunjangnya seperti senjata, benteng dan parit-parit.²⁸

Pembahasan yang akan muncul selanjutnya setelah terbentuk kota atau negara adalah terkait dengan siapakah dan seperti apakah sosok yang akan mengatur jalannya suatu pemerintahan. Karena tidak mungkin sebuah negara wujud tanpa ada sosok yang memimpin. Menurut Ibn Abi Rabi' sosok yang patut memimpin suatu masyarakat adalah orang yang terbaik di antara mereka. Yaitu orang dengan kriteria, ketika memerintahkan sesuatu atau melarang terhadap sesuatu, ia memulai dari dirinya sendiri terlebih dahulu baru kepada orang lain. Lebih jauh, Ibn Abi Rabi' menyebut bahwa kriteria yang demikian merupakan kategori orang yang paling bijak dan paling adil. Dengan demikian kriteria pemimpin menurut Ibn Abi

²⁷Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan*, 376.

²⁸ Ibn Abi Rabi', *Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik*, 95.

Rabi' adalah orang yang mampu menjadi panutan bagi rakyat yang dipimpinnya serta konsekuen terhadap kebijakannya.²⁹

Dalam kaitannya dengan bentuk atau model pemerintahan, Ibn Abi Rabi' lebih memilih bentuk pemerintahan yang berdasarkan monarki atau kerajaan.³⁰ Monarki adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja berdasarkan warisan alur keturunan. Oleh karena itu, Ibn Abi Rabi' tidak memilih model-model pemerintahan lain, seperti Aristokrasi,³¹ Oligarki,³² Demokrasi,³³ ataupun Demagogik.³⁴ Dalam konteks ini Ibn Abi Rabi' memberikan argumentasi terkait pemikirannya tentang model pemerintahan dalam bentuk monarki, yaitu bahwa jika sebuah negara dipimpin oleh banyak pemimpin, maka perpolitikan akan kacau, banyak konflik yang menyebabkan negara selalu gonjang-ganjing (tidak stabil). Atas dasar argumentasi ini, warga masyarakat merasa perlu seorang pemimpin tunggal dalam pemerintahan kerajaannya.³⁵

Berdasarkan penjelasan Ibn Abi Rabi' di atas dapat dipahami bahwa Ibn Abi Rabi' telah memberi kemasan bagi pemikiran politiknya dengan sentuhan-sentuhan ajaran agama Islam. Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa pandangan Ibn Abi Rabi' tentang kemunculan negara atau kota bukan pandangan yang mengikuti seratus persen pandangan Plato dan Aristoteles. Dalam bahasa lain, dapat dikatakan bahwa pandangan dan pemikiran Ibn Abi Rabi' tentang kemunculan

²⁹ Muhammad Jalal Syaraf, *Nasy'ah Al-Fikr Al-Siyasi Wa Tathawuriha Fi Al-Islam*, 214; Sjadzali, *Kepala Negara, Keadilan, Rakyat, Dan Pengelolaan*, 46.

³⁰ Monarki adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja (*al-Malik* atau *The King*). Lihat Namang, "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles," 259.

³¹ Aristokrasi adalah pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok kecil orang-orang pilihan atas dasar keturunan atau kedudukan. Lihat Yones Eka Putra Waruwu, "Bentuk Negara Pada Zaman Yunani Kuno," dalam *Jurnal Perguruan Tinggi Universitas Ekasakti-AAI Padang* (2021): 3, <https://osf.io/2kygh>.

³² Oligarki adalah model pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok kecil orang-orang kaya. lihat Ibid.

³³ Demokrasi adalah model perintahan yang dikelola oleh rakyat melalui wakil-wakilnya, baik di Parlemen, Eksekutif ataupun Yudikatif melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu badan pemilihan untuk memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan para wakil rakyat, baik untuk tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Lihat Ellya Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," dalam *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 44.

³⁴ Demagogik, yaitu apabila para warga di sebuah negara memanfaatkan hak-hak politiknya yang diberikan Demokrasi dengan tidak bertanggung jawab, dan hanya berdasarkan keinginan, kecenderungan dan kepentingan masing-masing, tanpa memikirkan akibat dan dampak negatif yang muncul kemudian. Lihat Nurtiyastuti, "Implikasi Politik Demagogi Pada Pemilihanpresiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Banyumas Perspektif Maqasid as-Syariah," 11.

³⁵ Muhammad Jalal Syaraf, *Nasy'ah Al-Fikr Al-Siyasi Wa Tathawuriha Fi Al-Islam*, 214.

negara sebagai pengembangan dari pemikiran Plato dan Aristoteles tetapi dengan dasar dan warna *worldview* Islam.

Pilar-pilar Negara Menurut Ibn Abi Rabi'

Ibn Abi Rabi' menyampaikan konsepsinya tentang empat pilar penting yang menjadi landasan berdirinya sebuah negara. Ibn Abi Rabi' menyebut pilar tersebut dengan *arkan al-mamlakah*. Menurutnya agar suatu negara bisa menjadi kuat harus terpenuhi secara ideal empat pilar tersebut. Empat *arkan al-mamlakah* itu ialah; kepala negara, keadilan, rakyat, dan pengelolaan.³⁶ Berikut ini penjelasan mengenai empat unsur penting negara sebagai berikut;

a. Raja (Pemimpin)

Pemimpin memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu institusi. Terlebih dalam institusi negara yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks. Seorang kepala negara, entah yang bergelar Khalifah, Raja, atau Presiden, memainkan peran sentral dalam kemajuan atau kemunduran suatu negara. Bahkan bisa dikatakan, kepala negara merupakan cerminan dari suatu negara. Melalui kepala negara yang amanah, bijaksana, cerdas, kuat, dan berdedikasi tinggi, akan tercermin gambaran masyarakat yang dipimpinnya. Begitu pula sebaliknya, kepala negara yang terlihat darinya sifat-sifat buruk, itulah cerminan masyarakatnya.³⁷

Mengingat kepala negara (raja) memiliki peran yang sangat sentral dalam pemerintahan. Maka orang yang berhak menduduki jabatan tersebut tentu bukan sembarang orang. Ibn Abi Rabi' menekankan bahwa orang yang pantas menduduki jabatan sebagai pemimpin haruslah orang dengan kriteria terbaik di antara masyarakat. Yaitu seseorang yang apabila melarang terhadap suatu perkara terlebih dahulu ia mulai dari dirinya sendiri, begitu pula apabila memerintahkan rakyatnya melakukan sesuatu hendaknya di mulai dari dirinya terlebih dahulu. Atau dalam bahasa yang lebih lugas, seorang pemimpin adalah orang yang paling bijak dan adil di masyarakat. Landasan argumentasinya adalah firman Allah: "*Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat.*"³⁸ Maka di antara etika seorang penguasa menurutnya yaitu hendaklah seorang pemimpin melaksanakan tanggungjawabnya

³⁶ Ibn Abi Rabi', *Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik*, 94.

³⁷ Pancawati, "Pemikiran Al-Farabi Tentang Politik Dan Negara," 101.

³⁸ QS. Al-An'am /6: 165.

dengan semaksimal mungkin dan hendaklah ia mengupayakan ketaatan rakyat kepadanya adalah ketaatan atas dasar cinta, bukan kebencian serta ketaatan yang terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.³⁹

Selain kriteria umum di atas, Ibn Abi Rabi' juga memberikan enam prasyarat yang harus dimiliki seorang kepala negara (raja), yaitu: (1) kekerabatan dengan raja sebelumnya, (2) kemauan yang besar, (3) ketajaman pikiran, (4) kesabaran dalam menghadapi berbagai persoalan, (5) kemampuan dalam pengelolaan finansial yang baik, dan (6) para pembantu yang dapat dipercaya.⁴⁰

Dengan demikian, seorang kepala negara akan berperilaku baik, beretika, bermoral atau berakhlak, maka dia akan dihormati dan dimuliakan, baik oleh kawan atau lawan politiknya, dan bahkan oleh seluruh rakyatnya, sehingga seorang kepala negara tidak menampilkan perilaku-perilaku yang arogan, kasar, pendusta, pembohong, penghianat, dan perilaku-perilaku negatif lainnya.

b. Keadilan

Ibn Abi Rabi' sangat berkomitmen terhadap keadilan dalam suatu pemerintahan, terbukti dengan menjadikannya salah satu dari empat pilar negara (*arkân al-mamlakah*). Artinya suatu pemerintahan tidak akan baik dan stabil tanpa adanya unsur keadilan. Menurut Ibn Abi Rabi' keadilan adalah hukum Allah di bumi-Nya. Bukti betapa tingginya kedudukan keadilan adalah bahwa semua bangsa, negara dan peradaban di muka bumi ini pasti berupaya menerapkan keadilan di dalam sendi-sendi kehidupan mereka. Keadilan juga merupakan slogan yang selalu diteriakkan di mana-mana.⁴¹ Bahkan setiap pemerintahan pasti memiliki pengadilan, ini artinya keadilan merupakan harga mati dalam suatu pemerintahan yang tidak dapat di tawar-tawar.⁴²

Ibn Abi Rabi' dalam konteks ini membagi keadilan pada tiga bagian pokok, yaitu: *Pertama*, Keadilan yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Keadilan bagian pertama ini terkait dengan pelaksanaan semua perintah-perintah Allah, baik yang wajib atau pun yang sunah. Contohnya seperti melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah, mendekatkan diri kepada-Nya, meramaikan tempat-

³⁹ Tsabit, *Al-Fikr Al-Siyâsi Al-Islâmi*, 95–96.

⁴⁰ Al-Tasakriti, *Al-Falsafah Al-Siyasah "inda Ibn Abi Al-Rabi"*, 176–177.

⁴¹ Hayat, "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi," 392.

⁴² Ibn Abi Rabi', *Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik*, 104.

tempat ibadah melalui berbagai bentuk ibadah, melaksanakan amalan-amalan sunah. Intinya patuh dan taat kepada semua perintah Allah dan Rasul-Nya.

Kedua, keadilan yang berkaitan dengan hak-hak antara sesama individu. Keadilan bagian kedua ini adalah upaya merealisasikan semua hak dan tanggung jawab kepada sesama individu dalam rangka terciptanya interaksi dan komunikasi yang baik antara sesama. Contohnya; seperti menunaikan kewajiban seseorang kepada sesama individu, komitmen pada kejujuran (*amanah*), mengembalikan titipan (*wadi`ah*) kepada pemiliknya, memberikan saksi kepada yang *haq* (yang benar).

Ketiga, keadilan yang berkaitan dengan hak-hak orang yang sudah wafat. Keadilan bagian ketiga ini adalah berkaitan dengan semua tindakan terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Contohnya seperti; mengafani dan menguburkan orang yang sudah wafat, mendidik anak-anak yatim piatu, atau memberi sedekah kepada mereka.⁴³

c. Rakyat

Menurut KBBI, rakyat adalah penduduk suatu negara.⁴⁴ Padanan katanya dalam bahasa Arab adalah "*ra'iyah*" (الرعية) yaitu masyarakat umum yang berada di bawah seorang pemimpin yang mengatur urusan dan kemaslahatan mereka.⁴⁵ Dari definisi singkat ini dapat diketahui bahwa rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara, yang mana tanpa rakyat mustahil terbentuk suatu negara. Karena itu dalam pemerintahan sebuah negara, keberadaan rakyat merupakan sebuah entitas yang tidak mungkin diabaikan. Rakyat merupakan unsur utama dan paling dominan dalam sebuah negara. Tanpa adanya rakyat, sebuah negara tidak akan pernah ada.⁴⁶ Karena itu, Ibn Abi Rabi' menjadikan rakyat sebagai salah satu pilar sebuah negara (*arkân al-mamlakah*).

Pada hakikatnya, entitas rakyat pada suatu negara tidaklah tunggal (*homogen*). Rakyat adalah unsur paling majemuk (*heterogen*) dalam pemerintahan. Karena rakyat adalah kumpulan dari berbagai individu yang beragam. Entah keragaman dalam faktor agama, ras, bahasa, strata ekonomi, tingkatan intelektual dan

⁴³ Ibn Abi Rabi', 229.

⁴⁴ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1159.

⁴⁵ Ahmad Mukhtar, *Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'ashirah* (Alam al-Kitab, 2008), 910.

⁴⁶ Triono et al., "Rakyat Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Agraria," 180.

sebagainya.⁴⁷ Oleh sebab itu, penguasa sebagai pihak yang berwenang untuk mengatur jalannya pemerintahan, tidak bisa menjalankan fungsinya tanpa melakukan klasifikasi terlebih dahulu. Karena itu Ibn Abi Rabi' mengklasifikasikan rakyat menjadi beberapa kategori, *pertama* klasifikasi rakyat berdasarkan pekerjaan dan kepakarannya, yaitu: (1) *muta'ahilun* (متأهلون); orang-orang ahli ibadah dan zuhud, (2) *hukama'* (حكماء); para ilmuwan seperti dokter, astronom, insinyur, matematikawan dan sebagainya, (3) *'ulama* (علماء); pakar ilmu agama yang menjadi rujukan dalam penentuan halal-haram, tafsir dan takwil, (4) *dzu ansab* (ذو انساب); para bangsawan dan pejabat, (5) *arbab al-hurub* (ارباب الحروب); para tentara dan polisi yang menjaga keamanan negara dari serangan pihak luar dan menjaga stabilitas negara, (6) *'amâr al-aswaq* (عمار الأسواق); para pebisnis yang mencukupi berbagai kebutuhan pasar, (7) *sakan al-qura* (سكان القرى); orang-orang kampung yang bekerja sebagai petani, nelayan, buruh dan sebagainya.⁴⁸

Kedua, klasifikasi rakyat berdasarkan tingkat pembelaannya terhadap kebenaran dan kebajikan. Ibn Abi Rabi' mengklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu: (1) orang-orang baik (*akhyar afadhil*). Mereka adalah orang-orang yang mencintai kebaikan dan membenci kejahatan, mereka memerintahkan kepada yang baik dan mencegah yang buruk dengan suka rela. Maka golongan ini harus dimuliakan, diperlakukan dengan baik dan diangkat derajatnya oleh pemerintah karena kebaikan mereka. (2) orang-orang jahat (*asyrar arâdzil*). Mereka adalah kebalikan dari golongan pertama. Yaitu orang-orang yang condong kepada kejahatan dan kriminalitas. Anjuran-anjuran kebaikan tidak bermanfaat bagi mereka. Maka mereka harus ditindak tegas oleh pemerintah, dalam kondisi tertentu mereka perlu dijauhkan dari masyarakat. Karena mereka akan membawa pengaruh negatif bagi masyarakat. (3) orang-orang yang pertengahan (*al-mutawasithûn*). Mereka adalah orang-orang yang berada di antara golongan pertama dan kedua. Yaitu, orang-orang yang terkadang condong kepada kebaikan dan terkadang keburukan. Mereka adalah orang-orang yang perlu diarahkan. Apabila mereka salah, maka harus ditegur dan diperbaiki kesalahannya.⁴⁹

Melalui pengelompokan rakyat ke dalam beberapa kategori seperti yang di paparkan oleh Ibn Abi Rabi' , diharapkan pengelolaan pemerintahan dapat berjalan

⁴⁷ Mardan Umar, "Internalisasi Nilai Kedamaian Melalui Pendidikan Kedamaian Sebagai Penguatan Pembangunan Karakter Pada Masyarakat Heterogen," dalam *Waskita* 1, no. 1 (2017): 85.

⁴⁸ Al-Tasakriti, *Al-Falsafah Al-Siyasah "inda Ibn Abi Al-Rabi"*, 185–186.

⁴⁹ Al-Tasakriti, 196.

dengan baik dan optimal. Di satu sisi, rakyat harus mengerti posisi dan kedudukannya di masyarakat.⁵⁰ Di sisi lain, pemerintah harus memperlakukan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan tepat sasaran sesuai posisi mereka di masyarakat. Bagi rakyat yang condong kepada kebaikan dan mendukung perbaikan, maka mereka dirangkul sebagai *partner*. Sedangkan bagi yang rakyat yang membangkang, maka harus ditindak dengan tegas namun tetap proporsional. Sehingga terciptalah ketertiban, kedamaian, keteraturan dan kestabilan dalam suatu negara.

d. Pengelolaan Negara

Setelah menerangkan tentang raja, rakyat dan keadilan sebagai pilar-pilar negara (*arkan al-mamlakah*), Ibn Abi Rabi' kemudian menerangkan pilar keempat yang bersifat lebih teknis yaitu pengelolaan negara (*tadbir*). Pengelolaan negara merupakan kemestian yang menggerakkan roda pemerintahan atau kerajaan. Pengelolaan yang baik akan berdampak lahirnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Ibn Abi Rabi' sangat memperhatikan pada bagaimana pengelolaan negara, karena pengelolaan sebagai aktivitas yang berhubungan langsung antara pemerintah di satu sisi dan di sisi lain dengan pihak yang diperintah, yaitu rakyat.⁵¹ Oleh karena itu, diperlukan kerangka metodologis yang jelas tentang aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan negara dan bagaimana cara pengelolaan yang ideal.⁵²

Terdapat empat kaidah metodologis dalam pengelolaan negara menurut Ibn Abi Rabi', yaitu: (1) pengelolaan rakyat (*hirasat al-ri'ayah*). Pemerintah sebagai pengelola jalannya pemerintahan hendaknya menyadari bahwa kedudukan yang dimilikinya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Maka pemerintah tidak boleh semena-mena dan bersikap otoriter kepada rakyatnya. Nilai keadilan dalam hal ini sangat diperhatikan. (2) Kemakmuran negeri (*'imarah al-buldân*), meliputi aspek pertanian (*mazari'*) dan kemakmuran negara secara umum (*amshar*).⁵³ Terkait pertanian, pemerintah perlu memperhatikan urusan air, yaitu terkait kelayakan dan kualitas, serta tentang pemerataan distribusinya. Adapun terkait kemakmuran negara secara umum yaitu dengan terwujudnya kedamaian

⁵⁰ Putridewi, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya," 138.

⁵¹ Bangun, "Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional," 53.

⁵² Aziz, "Pemikiran Politik Islam Muhammad Abid Al-Jabiri: Telaah Terhadap Buku Al-'Aql Al-Siyâsi Al-'Arabî: Muhaddidâtuh Wa Tajalliyâtuh," 125.

⁵³ Ibn Abi Rabi', *Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik*, 105.

dan keamanan masyarakat untuk berdomisili, terjaminnya keamanan aset dan properti, terjaminnya keselamatan kerja buruh, tercukupinya kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. (3) Pengelolaan kemiliteran (*tadbir al-jund*).⁵⁴ Kekuatan dan kelemahan suatu negara ditentukan dari kuat lemahnya militer. Begitu juga dengan keamanan masyarakat, sangat tergantung pada kekuatan militer. (4) Pengelolaan ekonomi (*taqdir al-amwâl*) yang meliputi perputaran ekonomi dalam dan luar negeri.⁵⁵

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan Ibn Abi Rabi' tentang negara tidak sama persis dengan pandangan para pemikir Yunani seperti Plato dan Aristoteles, karena dalam pandangan Ibn Abi Rabi' terkandung *worldview* Islam yang kental. Selain itu bentuk pemerintahan yang paling ideal menurut Ibn Abi Rabi' adalah model monarki (kerajaan), dengan argumentasi bahwa jika sebuah negara dipimpin oleh banyak pemimpin, maka perpolitikan akan kacau, banyak konflik yang menyebabkan negara selalu gonjang-ganjing (tidak stabil). Ibn Abi Rabi' merumuskan empat pilar utama dalam pembentukan suatu negara (arkân al-mamlakah), yaitu kepala negara, keadilan, rakyat, dan pengelolaan. Apabila keempat pilar tersebut dapat dipenuhi dengan seideal mungkin, maka akan tercipta suatu negara yang stabil dan kuat secara politis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fikr Al-Siyasi Fiy Al-Islam: Syakhshiyyat Wa Mazahib*. Iskandariyah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996.
- Al-Tasakriti, Naji. *Al-Falsafah Al-Siyasah "inda Ibn Abi Al-Rabi."* Beirut: Dar al-Andalus, 1983.
- Aziz, Jamal Abdul. "Pemikiran Politik Islam Muhammad Abid Al-Jabiri: Telaah Terhadap Buku Al-'Aql Al-Siyâsi Al-'Arabî: Muhaddidâtuh Wa Tajalliyâtuh." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 39, no. 1 (2015): 110-27. <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.42>.

⁵⁴ Ibn Abi Rabi', 106.

⁵⁵ Al-Tasakriti, *Al-Falsafah Al-Siyasah "inda Ibn Abi Al-Rabi,"* 189-191.

- Bangun, Budi Hermawan. "Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional." *Tanjungpura Law Journal* 1, no. 1 (2017): 52-63. [https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/18331#:~:text=Dari perspektif hukum internasional, wilayah,yang harus diatur melalui perjanjian.](https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/18331#:~:text=Dari%20perspektif%20hukum%20internasional,%20wilayah,yang%20harus%20diatur%20melalui%20perjanjian.)
- Danim, Sudarwan. *Riset Keperawatan: Sejarah Dan Metodologi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002.
- Gharayibah, Khalid Musthaf. "Manhaj Iyah Al-Fikr Al-Islamiy Fi Takhtit Al-Madinah Al-'Arabiyah Al-Islamiyah: Ibn Abi Rabi' Anmuzhajan." *Al-Majallah Al-Urduniyah Li Al-Ulum Al-Ijtima'iyah* 8, no. 1 (2015).
- Hayat, Hayat. "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi." *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 2 (2015): 388-408. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a10>.
- Ibn Abi Rabi'. *Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik*. Edited by Arif Ahmad Abd al-Ghani. Damaskus: Dar al-Kinan, 1996.
- Kaelan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama Dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- Kahalalah. *Mu'jam Al-Mu'alifin*. Beirut: Mu'asasah al-Risalah, n.d.
- Khotimah. "Agama Dan Civil Society." *Ushuluddin* 1, no. 0 (2014): 121-32.
- M. Ilham, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin. "Caliphate; Is It Theological Inevitability or Sociological Experimentation?" *Jurnal Ushuluddin* 29, no. 1 (2021): 45. <https://doi.org/10.24014/jush.v29i1.10479>.
- Muhammad Jalal Syaraf. *Nasy'ah Al-Fikr Al-Siyasi Wa Tathawuriha Fi Al-Islam*. Dar al-Ma'rifah al-Jami'ah, 1990.
- Mukhtar, Ahmad. *Mu'jam Al-Lughah Al-"Arabiyah Al-Mu"ashirah*. Alam al-Kitab, 2008.
- Namang, Raimundus Bulet. "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 247. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Nasution, Amhar. "Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Periode Harun Al-Rasyid Dan Al-Makmun." *Al-Hadi II*, no. 02 (2017): 395-402.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983.
- Nurtiyastuti, N. "Implikasi Politik Demagogi Pada Pemilihanpresiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Banyumas Perspektif Maqasid as-Syariah." Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9709/>.
- Pancawati, Hesti. "Pemikiran Al-Farabi Tentang Politik Dan Negara." *Aqlania 1* (2019): 105-12.
- Putridewi, Rosi Nani. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya." *Jurnal Hukum Bisnis 3*, no. 1 (2019): 1-20. <https://doi.org/10.31090/hukumbisnis.v3i1.829>.
- Rahmat, Syahrul. "Political Thought in the Mamluk Period: The Unnecessary Caliphate, by Mohamad El-Merheb." *African Historical Review 52*, no. 2 (2021), 87-91, <https://doi.org/10.1080/17532523.2022.2127684>
- Rambe, Toguan. "Pemikiran Politik Sunni Sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan." *Jurnal: Penelitian Medan Agama 11*, no. 1 (2020).
- Rosana, Ellya. "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 12*, no. 1 (2016): 38-53.
- Sirojuddin Aly. *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Sjadzali, Munawir. *Kepala Negara, Keadilan, Rakyat, Dan Pengelolaan*. Jakarta: UI-Press, 1993.
- Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik*. Damaskus: Dar al-Kinan, 1996.
- Triono, Agus, Ati Yuniati, Budiman N P D Sinaga, Efik Yusdiansyahi, Eka Elman, E Patra, Marlia Eka Purii A T, Muhammad Akib, and Upik Hamidah. "Rakyat Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Agraria." In *Tebaran Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, 171-200. Lampung: Sai Wawai Publishing, 2016.
- Tsabit, Adil. *Al-Fikr Al-Siyâsi Al-Islâmi*. Alexandria: Dar al-Jami'ah al-Jadid, 2002.

Umar, Mardan. "Internalisasi Nilai Kedamaian Melalui Pendidikan Kedamaian Sebagai Penguatan Pembangunan Karakter Pada Masyarakat Heterogen." *Waskita* 1, no. 1 (2017): 77-98.

Waruwu, Yones Eka Putra. "Bentuk Negara Pada Zaman Yunani Kuno." *Jurnal Perguruan Tinggi Universitas Ekasakti-AAI Padang*, 2021, 8. <https://osf.io/2kygh>.

Zarkali. *Al-A'lam*. Beirut: Dar al-'Ilm lil Malayin, n.d.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. "Worldview Islam Dan Kapitalisme Barat." *Tsaqafah* 9, no. 1 (2013): 15. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.36>.